

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu alat yang digunakan pemerintah di dalam mencapai tujuan sebagai sumber penerimaan Negara, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, karena pajak yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk kepentingan serta membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, sistem dan peraturan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian, warga negara selaku wajib pajak diberi kebebasan untuk memilih kebijakan dalam perhitungan pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Salah satu pajak yang dipungut adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Secara umum pajak dikenakan kepada subjek pajak atas objek jenis pajaknya masing-masing. Pemotongan atau pemungutan atas pajak pada umumnya dilakukan pada saat pihak lain melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *official assessment system*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *withholding system*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh wajib pajak.

PPh Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, akan dilakukan perhitungan pajak dari penghasilan yang diperoleh. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Dengan penjelasan serta memerhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yaitu: **“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap pada Perum. BULOG Divre Sumbar”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam mengangkat judul mengenai PPh Pasal 21 tentu akan memunculkan beberapa persoalan. Adapun rumusan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar
2. Bagaimana pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar
3. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan pada Perum BULOG Divre Sumbar
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar

#### 1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dari kegiatan magang, begitu banyak manfaat yang dapat diambil baik untuk penulis, peserta magang, untuk universitas dan bahkan untuk perusahaan tempat magang. Adapun manfaatnya yaitu :

##### 1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu perpajakan yang di peroleh dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga).
- c. Penulis dapat mengetahui langsung bagaimana perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 21 atas pegawai tetap pada perusahaan terkait.

##### 2. Bagi Peserta Magang

Bagi peserta magang, manfaat kegiatan magang itu sendiri tentu untuk memenuhi perkuliahan pada semester VI (enam). Selain itu, peserta magang dapat memperoleh bagaimana lingkungan kerja sesungguhnya. Untuk itu kegiatan magang ini sangat berperan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan. Manfaat lainnya adalah menambah wawasan serta pengetahuan baru dalam menghadapi dunia kerja nantinya, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang di berikan serta melatih diri sendiri untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam dunia kerja.

### 3. Bagi Universitas

Manfaat kegiatan magang bagi universitas yaitu untuk menghasilkan lulusan terbaik dari yang siap terjun ke dunia kerja sesuai posisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan saat ini.

### 4. Bagi Perusahaan

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas tinggi, juga untuk menjalin kerja sama yang baik dunia pendidikan dengan dunia kerja yaitu antara universitas dan perusahaan terkait.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pajak secara umum, lalu tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.



### BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang profil dan gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang latar belakang perusahaan, sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangan perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas masing-masingnya.

### BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana perhitungan, pemotongan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar dan bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum BULOG Divre Sumbar.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi kemajuan penulisan.

